

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Amandemen Keempat.
- _____. *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*. UU Nomor 17 Tahun 2013.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 9 Tahun 2015.
- _____. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang*. UU Nomor 16 Tahun 2017.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan*. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

B. Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Ashiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Azra, Azumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Revita Aditama, 2010.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Gubernur: Kedudukan, Peran, dan Kewenangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- _____. *Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan S.T. Christine Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Kristiono, Natal. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: UNS, 2015.
- L. Mathis, Robert. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

- M.D., Maruto dan Anwari W.M.K. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Mursitama, Tirta Nugraha. *Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Ormas*. Jakarta: BPHN, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandarlampung: Indepth Publishing, 2012.
- Santoso, Agus. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Setiawan, Bonnie. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil, Reposisi Peran Ornop/LSM di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharko. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Syafei, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Winayanti, Nia Kania. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

C. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly. "Mengatur Kebebasan Berserikat Dalam Undang-Undang". <http://jimlyschool.com>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.

Delly, Massaputro. "Dinamika Organisasi Kemasyarakatan: Pengawasan, Pendaftaran, dan Pembinaan". <http://wirapati.raddien.com>. Diakses tanggal 27 Desember 2018.

Marbun, S.F. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, 1997.

Marpaung, Satrya Pangadaran. "Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional". *Law Review* Volume XV, No. 1 – Juli 2015.

Prayoga, Dimas. "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan". *Tulisan Ilmiah*.

Ramdhani, Jabbar. "Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan". <https://news.detik.com>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.

Redaksi. "Dialog Pemerintah dan Ormas". <http://www.bappenas.go.id>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.

Safa'at, Muchamad Ali. "Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)". *Disertasi*. Depok: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Safaat. "Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan". <http://safaat.lecture.ub.ac.id>. Diakses tanggal 27 Desember 2018.

- Septianto, Bayu. "Sudah Ada 394.250 Ormas Terdaftar di Pemerintah Hingga 2018". <https://news.okezone.com>. Diakses tanggal 27 Desember 2018.
- Sianipar, Veronica Agnes. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan". *Jurnal Lentera Hukum*, 2014.
- Sudharto. "Kajian Keberadaan Propinsi Dalam Penguatan Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume 1, No 2, Juli 2011.
- Wibowo, Catur dan Herman Harefa. "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah". *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.